

# Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar

Risalatu Mirajiah, PhD

Jurusan Hubungan Internasional, International Women University (IWU)

E-mail: icha\_violetz@yahoo.com

**Abstract:** Democratization in Myanmar has drawn international attention, when on April 1, 2012 military junta held a free, fair general election. The success of Myanmar in holding the general election would become a new era of changes that was occurring domestically. Positive responses on the changes were shown by not only Myanmar's people but also the whole international communities which had previously pressured the state due to various violations of human right and democracy. Basically, some democratizing efforts had begun since the government drafted a new constitution in 2008, up to the winning of Thein Sein as President in the 2010 preliminary elections. Under Thein Sein leadership, there have been much changes leading to democracy, such as the achievement of ceasefire, economic improvement, the release of political detainees, mass media freedom, general elections, and the reestablishment of parliamentary functions. The question in this paper was, "How these internal and external factors influence the occurrence of democratization in Myanmar?" In this paper, the writer drew on the theories of democratization in describing the internal and external factors that have influence on the occurrence of democratization, by the three approaches, namely, modernization, transition, and structural approaches, from David Potter. The paper results indicated that the aim of the military junta at implementing the democratization was due to some internal factors in a domestic scope, predominated by domestic actors, and some external factors in a framework of democratization waves by a reason of spreading or promoting democratic values, as well pressures and other sanctions. The entire threats have led to the decline of military junta legitimacy in political arena, and expulsion by international world. Therefore, the writer concluded that the relationship between the internal factors and external factors would determine the continuity of democratization in Myanmar.

**Keywords :** Democratization, Internal Factors, External Factors, Military Junta, Myanmar

**Abstrak:** Demokratisasi di Myanmar telah menjadi sorotan dunia internasional, ketika pada tanggal 1 April 2012, pemerintahan junta militer menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. Keberhasilan Myanmar dalam menyelenggarakan pemilu ini akan menjadi era baru perubahan yang terjadi di dalam negeri. Respon positif atas perubahan tidak hanya ditunjukkan oleh rakyat Myanmar, namun juga seluruh masyarakat internasional yang dulu menekan Myanmar akibat pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi. Pada dasarnya beberapa upaya demokratisasi ini telah dimulai sejak pemerintahan merencanakan konstitusi baru tahun 2008, sampai dengan kemenangan Thein Sein sebagai presiden pada pemilu sela tahun 2010. Sejak kepemimpinan Thein Sein ini banyak perubahan baru yang mengarah pada demokrasi, seperti dilaksanakannya gencatan senjata, perbaikan ekonomi, membebaskan tahanan politik, kebebasan media massa, pemilu, sampai dengan pengembalian fungsi parlemen. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu, "Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi terjadinya demokratisasi di Myanmar"? Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori demokratisasi untuk menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya demokratisasi, dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan modernisasi, pendekatan transisi, dan pendekatan struktural, David Potter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan junta militer untuk melakukan demokratisasi ini disebabkan oleh adanya faktor internal dalam lingkup domestik, seperti munculnya krisis ekonomi dan keterbelakangan sosial, dan menguatnya kelompok pro demokrasi, juga faktor eksternal dalam lingkup internasional seperti adanya tuntutan negara-negara donor terkait bantuan ekonomi, sanksi dan embargo yang dilakukan negara-negara Barat, ketergantungan Myanmar terhadap negara-negara lain, sampai dengan kecaman Amerika Serikat (AS) tentang penahanan Aung San Suu Kyi. Keseluruhan ancaman ini telah menyebabkan merosotnya legitimasi junta militer di kancah perpolitikan, serta pengucilan oleh dunia internasional. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa keterkaitan antara faktor internal dan faktor eksternal itu, akan menentukan keberlangsungan demokratisasi di Myanmar.

**Kata kunci :** Demokratisasi, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Junta Militer, Myanmar

## Pendahuluan

Myanmar (sebelumnya bernama Burma)<sup>211</sup> merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, dan terkenal dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi. Negara ini telah puluhan tahun dipimpin oleh pemerintahan junta militer yang dikenal dengan sebutan *The State Peace and Development Council* (SPDC).<sup>212</sup> SPDC merupakan perubahan dari *State Law and Order Restoration Council* (SLORC)<sup>213</sup> sejak tanggal 18 September 1997. Junta militer telah berkuasa di Myanmar sejak terjadinya kudeta militer oleh Jenderal Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962 sampai Jenderal Than Shwe. Jenderal Than Shwe mulai mengambil posisi kepemimpinan di Myanmar dimulai sejak tahun 1992 sampai dengan perubahan konstitusi baru dibuat pada tahun 2008. Ketika dalam penguasaannya, kebijakan junta militer tetaplah sama, yakni menghilangkan nilai-nilai demokrasi dan menggantikannya dengan tatanan yang bersifat sentralistik dan otoriter. Nilai-nilai demokrasi yang telah diabaikan junta militer tersebut menyebabkan pelanggaran HAM menjadi hal biasa di Myanmar, yang pada akhirnya pihak sipil hanyalah sebagai penonton dan tidak

terlibat menciptakan demokrasi partisipatoris.<sup>215</sup>

Demokrasi di Myanmar dapat dianggap sebagai demokrasi yang mengalami kebekuan atau stagnan. Artinya terdapat penerapan demokrasi, namun semangat demokrasi yang seharusnya memberikan kebebasan serta peran utama kepada pihak sipil menjadi tidak ada. Bahkan junta militer yang mengambil alih kekuasaan, mengendalikan semua sistem pemerintahan.<sup>216</sup> Sementara masyarakat sipil yang berupaya mewujudkan demokrasi melalui supremasi sipil mengalami penekanan yang sangat luar biasa, dimana pemilu dilakukan tetapi peserta yang melakukan pemilu adalah partai politik bentukan junta militer untuk mempertahankan kekuasaan.

Sejak junta militer memerintah di Myanmar tahun 1962, banyak sekali terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh junta militer. Seperti tidak adanya pengadilan yang independen dan juga junta militer menekan para aktivitas politik oposisi. Sehingga junta militer dapat dengan bebas berkuasa. Di samping itu pula, pemerintah junta militer membatasi akses internet dan hubungan dengan dunia internasional sehingga

---

<sup>211</sup> Alan Collins, *Security and Southeast Asia : Domestic, Regional and Global Issues*. Singapore: ISEAS.2003.hal.27

<sup>212</sup> Junta militer adalah dewan pemerintahan yang didirikan dan dikuasai oleh militer. Deskripsi ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>213</sup> Burma Country Profile. Tersedia dari [http://news.bbc.co.uk/2/hi/Europe/country\\_profiles/1300003.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/Europe/country_profiles/1300003.stm). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2012.

<sup>214</sup> Ibid

---

<sup>215</sup> Participatory democracy merupakan demokrasi konstitusional atau paham negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) yang bertumpu aturan mayoritas melalui perluasan partisipasi rakyat secara bebas melalui kekuatan-kekuatan kolektif yang terdapat di tangan civil society. Dikutip dalam buku Mohtar Mas'ood. *Negara, Kapital, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2003. hal 3

<sup>216</sup> Sistem pemerintahan yang dimaksud adalah Dewan Peneguhan Hukum dan Peraturan (SLORC) dan kemudian berubah menjadi Dewan Ketentraman dan Pembangunan Negara hadir dengan nama yang soft namun dalam pelaksanaannya jauh dari harapan perilaku yang otoritarian serta melanggar HAM.

masyarakat Myanmar dapat dikontrol sepenuhnya oleh junta militer. Semua itu merupakan serangkaian kebijakan junta militer yang ingin tetap melanggengkan kekuasaannya dibawah kontrol pemerintahan junta militer. Salah satu sorotan masyarakat internasional yaitu terkait dengan penahanan pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi. Tokoh ini telah mengalami penahanan selama 20 tahun lebih akibat seruan demokrasi yang begitu gencar dilakukan bersama para pengikutnya.

Akibat dari tindakan pemerintahan junta militer ini pada akhirnya memunculkan perhatian masyarakat internasional. Bahkan berbagai desakan muncul atas pelanggaran HAM tersebut. Desakan dan ancaman internasional atas Myanmar ini secara tidak langsung membawa dampak buruk bagi situasi dan kondisi yang berada di dalam negeri Myanmar itu sendiri. Dampak dari sanksi ekonomi negara-negara Barat seperti, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) selama 20 tahun lebih<sup>217</sup> telah membuat perekonomian di Myanmar semakin tidak berkembang dan terpuruk. Pengucilan Myanmar dari pergaulan dunia dan tekanan internasional pun ternyata berdampak buruk bagi kehidupan ekonomi, sosial dan politik masyarakat secara

keseluruhan. Sehingga proses demokratisasi dan perdamaian justru semakin sulit terlaksana.

Atas berbagai ancaman dan desakan yang muncul terhadap Myanmar, dan menyadari akibat dari tekanan domestik dan internasional membuat Myanmar semakin terpuruk, pada akhirnya pemerintahan Myanmar mulai melakukan demokratisasi. Hal ini yang telah dilakukan oleh pemerintahan Myanmar, sejak kepemimpinan Jenderal Thein Sein pada Januari 2011. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, pemerintahan Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang adil dan dihadiri oleh para pengamat internasional. Myanmar telah sekian kali mendapatkan kegagalan dalam melaksanakan pemilu, namun saat ini negara yang puluhan tahun dipimpin oleh rezim militer, telah serius melakukan transformasi politik dalam rangka mendorong terwujudnya demokratisasi. Upaya demokratisasi ini telah muncul sejak kepemimpinan Thein Sein pada tanggal 4 Januari 2011. Sejak kepemimpinan jenderal Than Shwe digantikan oleh Jenderal Thein Sein sebagai presiden di Myanmar, berbagai perubahan positif di dalam negeri kerap terjadi. Salah satunya yaitu terkait cara pandangannya dalam mereformasi politik yang cukup terkenal di Myanmar.

Dalam rangka membangun demokrasi, Thein Sein berupaya melakukan hubungan lebih dekat dan konsolidasi dengan para pemimpin oposisi, membebaskan para tahanan politik, dan menjalin sebuah perdamaian dengan etnis lainnya. Kegiatannya sebagai seorang pemimpin pemerintahan telah membuktikan adanya sebuah keseriusan dalam mereformasi politik, sekaligus menjalin hubungan kerjasama

---

<sup>217</sup> Amerika Serikat adalah negeri demokrasi pertama dalam dunia modern, dan identitasnya sebagai sebuah bangsa tidak dapat dipisahkan dari komitmennya terhadap nilai-nilai liberal dan demokratis. Oleh karena itu, orang-orang Amerika mempunyai suatu kepentingan khusus dalam pengembangan lingkungan global yang sesuai bagi demokrasi. Dikutip dalam Samuel P. Huntington (Terj.). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 1995. Hal 32

dengan para pemimpin oposisi di bawah bendera partai NLD. Sehingga ketika pemerintahan Myanmar memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu pada tanggal 1 April 2012 sebagai wujud demokratisasi, pihak kelompok oposisi secara langsung menyetujuinya. Pemilu yang diselenggarakan secara adil dan transparan serta dihadiri oleh pemantau komunitas internasional merupakan salah satu upaya rejim militer Myanmar dalam melakukan demokratisasi. Hasil dari pemilu tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh partai oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Pada saat itu Aung San Suu Kyi telah mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat Myanmar. Termasuk juga dari kalangan partai NLD yang selalu mendukung pemimpin oposisi tersebut.

Ternyata tidak hanya itu saja, Thein Sein juga mulai mendukung para pemimpin militer muda untuk melakukan perubahan dalam mereformasi politik yang lebih baik. Bahkan upaya lainnya yang luar biasa yaitu, mencabut larangan terhadap partai NLD dalam mendukung pemimpin Aung San Suu Kyi untuk tetap bertahan dalam kepemimpinannya di Myanmar. Thein Sein akan berupaya untuk membawa Suu Kyi pada barisan terdepan dalam mengatasi persoalan di bidang sosial, ekonomi, politik, serta mengubah citra negaranya menuju negara yang lebih mandiri dan berkembang. Begitu juga dengan kebijakan luar negerinya, yang lebih menekankan pada sistem liberalisasi yang lebih terbuka terhadap perdagangan bebas, serta melanjutkan hubungan kerjasama dengan negara-negara luar dalam bidang investasi.

<sup>218</sup> Shyam Saran. "The Pivot of Change in

Apa yang terjadi di Myanmar setidaknya menegaskan bahwa dengan kepemimpinan Jenderal Thein Sein ini, pada dasarnya telah muncul beberapa upaya demokratisasi. Beberapa perubahan ini, telah mulai dilakukan oleh para pemimpin militer di Myanmar. Bahkan kekuatan militer Myanmar yang sangat kuat pun mampu melakukan reformasi tersebut, semata demi terwujudnya negara yang demokratis. Meskipun upaya ini belum berdampak seluruhnya bagi pembangunan dalam negeri, namun hal ini telah menunjukkan adanya kemajuan di Myanmar. Bahkan kemajuan Myanmar ini telah mendapatkan apresiasi dari dunia internasional termasuk AS, Uni Eropa dan negara-negara lainnya yang dulu menekan Myanmar atas isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Permasalahan kemudian muncul yaitu bagaimana sebuah negara yang sejak dulu mengalami kediktatoran oleh rezim militer, mampu menjalankan upaya demokratisasi? Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi terjadinya demokratisasi di Myanmar? Keberhasilan demokratisasi di Myanmar merupakan salah satu kajian yang sangat menarik bagi para penstudi hubungan internasional, dikarenakan Myanmar merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang cukup lama mengalami sistem pemerintahan otoriter-sentralistik. Puluhan tahun negara ini mengalami sebuah konflik internal antara pemerintah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan munculnya isu

---

Asia". Indian Express. New Delhi. Dikutip dalam Ganganath Jha. *The Quest for Democratization in Myanmar*. The Observer London, 22 Agustus 2011. Hal 7

demokratisasi di Myanmar yang telah mengalami respon dari dunia internasional ini akan menjadi fenomena menarik di kawasan Asia Tenggara. Proses demokrasi di Myanmar juga merupakan salah satu bentuk kemajuan pesat dari sebelumnya mengalami sistem pemerintahan yang dipimpin oleh junta militer.

Hal lain yang menarik bagi kajian demokratisasi di Myanmar juga adalah, faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya demokratisasi di negara tersebut. Pembahasan dalam tulisan ini akan memberikan gambaran, di mana faktor yang mempengaruhi terjadinya demokratisasi dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Artinya keberadaan faktor internal yaitu seperti krisis ekonomi dan juga menguatkan kelompok oposisi atau kalangan masyarakat sosial, tidak bisa menyimpulkan bahwa proses demokrasi di Myanmar berhasil dilakukan hanya dari faktor internal saja. Hal ini terbukti dari beberapa dekade sebelumnya negara ini telah mengalami dinamika internal terkait dengan permasalahan pembangunan nasional. Munculnya gerakan-gerakan sosial yang disebabkan tidak meratanya sistem perekonomian tidak membuat pemerintahan junta militer berhenti untuk melakukan kekerasan bersenjata dan mau melakukan reformasi. Namun seiring berjalannya waktu, dengan menambahnya tekanan-tekanan dari dunia internasional berupa sanksi embargo, dan juga pengucilan dunia internasional, ketika itu juga Myanmar mulai berfikir dan mengambil alih formasi pemerintahannya menjadi lebih demokrasi. Proses demokrasi inilah yang menjadi isu penting bagi para penstudi hubungan internasional yang meneliti terkait dengan isu

demokratisasi di kawasan Asia Tenggara.

### **Pandangan Teoritis Dalam Proses Menuju Demokrasi di Sebuah Negara**

Untuk menjelaskan pola-pola demokratisasi dibutuhkan seperangkat generalisasi, teori dan pendekatan yang saling berhubungan. Demokratisasi adalah proses menuju demokrasi.<sup>219</sup> Menurut Potter kata “demokratisasi” merujuk pada perubahan-perubahan politik menuju arah yang lebih demokratis.<sup>220</sup> Sedangkan Diamond, Linz dan Lipset menjelaskan bahwa jalan demokrasi adalah pilihan yang realistis dan mungkin bagi masyarakat dunia dewasa ini.<sup>221</sup>

David Potter mencoba menganalisis lebih jauh terkait dengan demokratisasi di sebuah negara, di mana transisi menuju demokrasi kontemporer ini dimulai dari dalam tubuh rejim otoriter (misalnya di Amerika Latin) atau yang terutama didorong oleh kekuatan eksternal (misalnya di Eropa Timur). Namun analisis terhadap proses-proses demokratisasi menurut Potter dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan modernisasi, pendekatan transisi dan pendekatan struktural.<sup>222</sup> Ketiga pendekatan ini merupakan salah satu alat atau tahapan-tahapan yang ditawarkan Potter dalam melihat proses demokrasi itu sendiri secara

---

<sup>219</sup> Anders Uhlin. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan. hal 10

<sup>220</sup> David Potter (Ed.). 2000. *Democratization*. Cambridge: Open University Press. hal 3.

<sup>221</sup> Diamond, Linz dan Lipset, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'od. *Op. Cit.* hal. 14

<sup>222</sup> David Potter (Eds.). *Op. Cit.* hal. 10.

komprehensif. Tetapi bukan berarti ketiga pendekatan ini dapat diterapkan di semua negara, karena masing-masing karakteristik pemerintahan dari sebuah negara akan berbeda. Seperti halnya di Amerika Latin, proses demokrasi berhasil dilakukan karena dipengaruhi oleh faktor internal, dibandingkan kesuksesan Eropa Selatan dalam memajukan demokratisasi nya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi, pada dasarnya ketiga pendekatan ini bukan menjadi parameter sebuah negara dalam melakukan demokratisasi. Penulis menggunakan ketiga pendekatan ini dikarenakan sesuai dengan kasus demokratisasi yang terjadi di Myanmar. Dimana proses demokrasi tidak berjalan lancar ketika tekanan hanya dilakukan dalam lingkup domestik saja. Namun dengan munculnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer dan berakhir pada pelanggaran HAM dan demokrasi, saat itu juga dunia internasional ikut memberikan tekanan yang lebih besar terhadap Myanmar, yang secara tidak langsung menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Myanmar untuk melakukan reformasi mengarah demokrasi. Salah satunya adalah dibentuk konstitusi baru 2008, dan dimunculkannya pemilu yang adil dan transparan. Dengan demikian, keseluruhan faktor internal dan juga eksternal cukup mendorong terjadinya demokratisasi di Myanmar.

Pendekatan modernisasi menekankan proses demokratisasi sebagai bagian dari proses modernisasi. Perkembangan sosial-ekonomi meningkatkan prospek demokrasi. Sekulerisasi atau westernisasi kultur politik diyakini sebagai faktor positif bagi demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Lipset yang dikutip oleh Potter,

demokratisasi adalah hasil dari perubahan panjang kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan budaya.<sup>223</sup> Dalam pendekatan modernisasi ini, tingkat atau perkembangan sosial-ekonomi merupakan kunci untuk menjelaskan demokratisasi yang terjadi. Perkembangan sosial-ekonomi di sebuah negara dapat memperkuat kelas menengah, dan kelas menengah yang banyak adalah baik dan merupakan pendukung demokrasi karena hal tersebut mengurangi atau memperkecil konflik melalui partai-partai politik dan menghilangkan kelompok-kelompok ekstrim. Kelas menengah ini dapat dikatakan adalah kelompok borjuis atau secara pendapatan cukup memenuhi kebutuhan fundamentalnya dalam bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, hukum dan juga politik. Hal ini lah yang tidak muncul di Myanmar, di mana sebagian besar masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Sementara kalangan menengah sebagian besar duduk di sebuah pemerintahan yang dikatakan sebagai kelompok kuat yang otoriter atau disebut junta militer.

Pendekatan selanjutnya terkait dengan analisisnya mengenai demokratisasi adalah pendekatan transisi. Pendekatan ini cenderung lebih menekankan pada peranan aktor-aktor politik dan proses-proses politik dari para aktor tersebut dalam transisi aktual dari rejim otoriter menuju rejim yang lebih demokratis. Gerakan, pilihan dan strategi para elit politik dianalisis untuk menjelaskan proses demokratisasi. Negosiasi antara kelompok-kelompok “garis lunak” dalam rejim otoriter dan tokoh-tokoh

---

<sup>223</sup> *Ibid.* hal. 11

moderat pro-demokrasi juga menjadi kajian. Fokus penjelasan dari pendekatan transisi adalah berdasarkan proses sejarah politik yang ditandai oleh konflik sosial.<sup>225</sup>

Pendekatan terakhir terkait dengan demokratisasi yang dikemukakan Potter yaitu pendekatan struktural, di mana Potter menekankan proses-proses perubahan kekuasaan yang mendukung terjadinya demokratisasi. Struktur kelas, negara dan kekuatan-kekuatan serta hubungan-hubungan transnasional menjadi faktor yang dianalisa. Dalam pendekatan struktural ini juga dapat digunakan teori-teori tentang negara, hubungan negara-masyarakat, struktur kelas dan hubungan antar negara. Fokus penyelidikan pada pendekatan struktural ini adalah proses perubahan sosial dalam waktu lama. Proses-proses demokratisasi dijelaskan melalui perubahan struktur kekuasaan.<sup>226</sup> Premis dasar dari pendekatan struktural tentang demokratisasi adalah bahwa hubungan-hubungan khusus dari struktur kekuasaan ekonomi, sosial, politik secara gradual berubah melalui paksaan-paksaan dan kesempatan yang ada dalam sejarah, yang membawa elit-elit dalam sebuah

lintasan panjang sejarah menuju demokrasi liberal. Hubungan-hubungan struktur yang lain secara historis masuk dalam tujuan-tujuan politik.

Perubahan struktural dan bentuk dari *state power* adalah sesuatu yang mendasar dalam demokratisasi. Rueschemeyer, memperlihatkan bahwa "perubahan konfigurasi- konfigurasi kekuatan transnasional dapat mempengaruhi persekutuan atau pengelompokan kelas dan keadaan alamiah dari negara" Sebagai contoh, ketergantungan ekonomi dari sebuah negara kepada negara yang lain dapat memperlambat industrialisasi dan membuat kelas menengah tidak berkembang (jumlahnya tetap sedikit), sehingga mengakibatkan gerakan-gerakan pro-demokrasi melemah. Pada intinya pendekatan struktural yang dikemukakan oleh Potter sebagian besar lebih menekankan pada aspek lingkungan internasional dan aktor-aktor luar negeri yang berperan penting dalam penciptaan demokrasi.

Pada akhirnya Potter menyimpulkan bahwasannya dalam menganalisis transisi demokrasi tersebut merujuk pada apa yang sedang terjadi dalam kondisi di dalam negerinya sendiri dan juga tata hubungan internasional yang mempengaruhi terjadinya demokrasi. Menurutnya, faktor-faktor domestik memainkan peran utama dalam masa transisi. Tidak ada masa transisi yang awalnya bukan konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari adanya perpecahan-perpecahan mendasar dalam negerinya sendiri. Sehingga hal ini memberikan stimulus bagi negara-negara luar dalam memainkan peranannya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi di seluruh

---

<sup>224</sup> David Potter, Loc.Cit.

<sup>225</sup> Guillermo O'Donnell, et.al. (eds.) (1986) *Transition from Authoritarianism Rule: Prospect for Democracy*. Vol. 3. The John Hopkins University Press, Baltimor, p. 6. Lihat pada Muhammad AS Hikam (1999) *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES, Jakarta, hal 32

<sup>226</sup> Konsep dari "changing structure of power" adalah sesuatu yang abstrak dan membutuhkan kalimat yang tepat untuk mengklarifikasikannya. Banyak struktur kekuasaan yang memaksa perilaku dan membentuk pola pikir dari individu-individu dan elit dalam masyarakat. Sistem Keuangan, sebagai contoh, menurut Gidens, adalah sebuah struktur kekuasaan.

<sup>227</sup> David Potter, Op. Cit, hal. 18

kawasan. Lebih sederhana lagi, Potter pun menjelaskan demokrasi ini menjadi beberapa faktor yaitu *economic development, social divisions, state and political institutions, political culture and ideas, transnational and international engagements (including war)*.<sup>228</sup> Hal tersebut merupakan faktor-faktor yang secara keseluruhan mempengaruhi terjadinya demokratisasi suatu negara.

### **Faktor Ekonomi dan Keterbelakangan Sosial di Myanmar**

Bagian ini tidak menjelaskan peran-peran dari kelompok menengah namun konteksnya adalah perkembangan ekonomi dari sebuah negara atau modernisasi, tujuannya adalah untuk melihat indikator dari perekonomian dari negaranya sendiri. merujuk pada teorinya Potter terkait dengan demokratisasi, dimana salah satu akar masalah dari demokratisasi itu sendiri adalah adanya pengaruh dari dalam negeri. Pendekatan modernisasi yang diungkapkan Potter merupakan titik sentral dari adanya pengaruh dalam negeri dalam hal pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, seperti diketahui bahwa Myanmar merupakan negara yang masuk dalam kategori miskin, meskipun negara ini memiliki sumber daya alam yang begitu luas.<sup>229</sup> Beberapa upaya eksploitasi sumber daya

berkelanjutan telah menambah tantangan pembangunan negara dan hasil degradasi lingkungan yang parah, terutama dalam bentuk menurunnya kualitas tanah akibat penggunaan berlebihan atau penyalahgunaan tanah, dan diperparah oleh deforestasi yang meluas. Tingkat deforestasi Myanmar merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara (1,4% pa). Hal yang terpenting, hutan kayu negara itu sedang dibersihkan untuk mendapatkan mata uang asing baik untuk militer dan kelompok-kelompok etnis, dengan sedikit perhatian untuk pelestarian jangka panjang dari sumber daya yang berharga atau efek konsekuensi pada ekosistem. Hal tersebut merupakan salah satu indikator yang memperparah kondisi perekonomian di dalam negeri.<sup>230</sup>

Selanjutnya tingkat perekonomian runtuh juga disebabkan oleh makin maraknya tindakan korupsi, ketidaktahuan korelasi ekonomi dan isolasi internasional merupakan salah satu indikator yang menyebabkan kemiskinan terjadi. Tindakan korupsi yang dilakukan militer sudah menjadi sifat sistemik pada tingkat politik dan ekonomi. Rezim militer sengaja menerapkan kebijakan kronisme perusahaan dan hak menganggarkan seperti lisensi impor mobil dan telepon untuk perusahaan pilihan dan anggota keluarganya. Tidak hanya itu saja, tindakan korupsi yang dilakukan pemerintah juga dilakukan berkaitan dengan dana pendidikan dan dana kesehatan

---

<sup>228</sup> David Potter (Ed.), *Loc. Cit*

<sup>229</sup> Di antara sumber daya yang paling penting dari Myanmar adalah hutan yang memiliki kayu jati. Minyak dan gas alam merupakan penghasil ekspor resmi. Myanmar juga memiliki sumber daya alam yang besar seperti batu mulia, batu giok, ruby, batu mirah, dan batu safir. Sumber-sumber yang

---

lainnya yaitu batu bara, tembaga, emas, besi, timah, monazite, gas alam, nikel, minyak, perak, timah, dan seng. Diambil dalam “*The EC-Burma/Myanmar Strategy Paper*”, Consultative Group, (2007-2013), hal 7.

<sup>230</sup> *Ibid*

untuk masyarakat Myanmar. Dalam bidang pendidikan saja pemerintah menghabiskan 1,3 persen GDP. Hal tersebut merupakan persentase yang sangat rendah di tingkat internasional. Presentase kesehatan pun lebih buruk dibandingkan presentase pendidikan yang hanya 0,5 persen dari GDP (salah satu paling rendah di dunia). Presentase tersebut menunjukkan bahwa layanan pendidikan maupun kesehatan di Myanmar sama sekali tidak diperoleh oleh masyarakat (daerah pedesaan). Sebagian besar pelayanan kesehatan hanya diperoleh oleh kalangan menengah ke atas atau kalangan yang telah memiliki sekolah medisnya sendiri.<sup>231</sup>

Di samping itu juga, krisis ekonomi muncul akibat dilakukannya usaha ekonomi ilegal yang didasarkan pada penyelundupan narkoba,<sup>232</sup> batu permata, dan kayu. Perdagangan gelap ini telah menopang kelompok-kelompok bersenjata, di antaranya kelompok etnis minoritas, serta pemerintah militer Myanmar. Sehingga penyelesaian masalah ini akan sulit tercapai, dikarenakan kedua pihak yang berseteru tetap mengeksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ilegal tersebut tidak “menetes” dan tidak memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan atau peluang mata pencaharian. Tidak adanya pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pemerintah ini menyebabkan masyarakat hidup dalam kemiskinan.<sup>233</sup>

<sup>231</sup> David I. Steinberg, “*Burma/Myanmar: What Everyone Needs To Know*”, (Oxford University Press, 2010). hal 95-96.

<sup>232</sup> Myanmar adalah negara kedua produsen opium di dunia, dan juga produsen pertama dalam amfetamin

<sup>233</sup> *The EC - Burma/Myanmar Strategy Paper*. Op. Cit. hal.7

Situasi kemiskinan ini akan menjadi salah satu permasalahan krusial yang di hadapi masyarakat Myanmar dan akan menjadi sorotan dunia internasional, karena pemimpinnya belum dapat mengendalikan roda pemerintahan dengan baik. Indikator kemiskinan di Myanmar telah dikeluarkan oleh laporan UNDP, *Ministry of Planning and Economic*

*Development Myanmar*, pada bulan Juni tahun 2007. Dari hasil laporan UNDP sekiranya dapat menunjukkan terkait kontribusi untuk masing- masing wilayah miskin yang memperhitungkan baik kejadian atau indikator-indikator terjadinya kemiskinan, dan juga berat populasi (jumlah penduduk) dari masing-masing wilayah tersebut. Wilayah yang berkontribusi paling besar terhadap kemiskinan nasional adalah Mandalay (5,7%). Dinyatakan orang miskin 32% pada tingkat penghimpunan ,berasal dari wilayah Mandalay (5,7%). Hal ini juga diikuti oleh daerah Ayeryawaddy (4,2%), dan Sagaing (3,7%). Begitu pula dengan daerah Chin, Kachin, dan Shan Timur, meskipun daerah-daerah tersebut termiskin, populasi mereka cukup kecil, dimana hal ini dapat mengurangi kontribusi mereka terhadap kondisi kemiskinan di tingkat penghimpunan.<sup>234</sup>

Kemudian puncaknya pada tahun 2009 UNDP juga mengeluarkan data pembangunan bagi negara-negara ASEAN. Sebuah penilaian dari lembaga internasional tersebut telah cukup menambah beban panjang bagi Myanmar dalam hal pembangunan ekonomi, dimana pada tahun 2009 UNDP menggolongkan Myanmar masuk

<sup>234</sup> UNDP, *Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar (Poverty Profile)* IHLCA Project Technical Unit Yangon, Union of

dalam kategori negara terendah se-Asia Tenggara. Berikut ini daftar tabel yang ditunjukkan oleh UNDP: yang ditunjukkan oleh

Tabel.1 : Tingkat Pertumbuhan di ASEAN (Data dibawah ini merupakan salah satu bukti tingkat perekonomian atau pendapatan domestik di kawasan Asia Tenggara, khususnya Myanmar yang mengalami pendapatan ekonomi yang rendah)<sup>235</sup>

	Myanmar	Tertinggi di Asia Tenggara	Terendah di Asia Tenggara	Rata-rata di Asia Tenggara
GDP Perkapita	\$ 1.200	\$ 50.100 (Brunei)	\$ 1.200 (Myanmar)	\$ 2.400
Tingkat Pengangguran	4,9 %	\$ 40 % (Timor Leste)	1,6 % (Thailand)	4,2 % (tidak termasuk Timor Leste)
Tingkat Kemiskinan	32,7 %	42 % (Timor Leste)	51 % (Thailand)	26 %

UNDP tersebut disebabkan pada umumnya karena adanya ketidak-adilan ekonomi oleh penguasa junta militer sebagai kelompok mayoritas (etnis Burma). Persoalan ketidakadilan ekonomi sebenarnya telah berlangsung lama di kalangan etnis minoritas yang mengalami diskriminasi ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa situasi di Myanmar ini menunjukkan ekonomi yang carut marut atau tidak stabil yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer. Hal ini akan berdampak pada kondisi sosial seluruh masyarakat Myanmar, yang pada akhirnya hal menjadi *boomerang* bagi negaranya sendiri, seperti halnya tekanan dari domestik berupa tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap pemerintahannya agar dapat bersikap

lebih peduli terhadap masyarakatnya dalam membangun kesejahteraan. Keseluruhan indikator yang menggambarkan kondisi kemiskinan ini merupakan salah satu akar masalah yang dihadapi Myanmar ketika pemerintahannya gagal untuk menjalankan kebijakan ekonomi. Sehingga pada akhirnya kondisi tersebut membawa legitimasi pemerintahan junta menjadi semakin merosot.

### Krisis Legitimasi Junta Militer

Berdasarkan teori demokratisasi yang telah dijelaskan terkait pendekatan transisi yang dikemukakan oleh Potter, dan juga disepakati oleh ilmuwan lainnya seperti Rustow dan Huntington, menilai bahwa terdapat sejarah panjang berupa konflik sosial dalam menjalankan proses demokratisasi itu sendiri. Pada intinya terdapat sebuah pertarungan sengit antara kedua kelompok yaitu pemerintahan junta militer dan masyarakatnya sendiri. Sejarah konflik dengan berbagai indikator yang mempengaruhinya, telah membuat legitimasi junta militer semakin merosot. Terlebih lagi pemerintahan junta militer yang merasa memiliki pengaruh besar dalam militer, dan telah mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan Myanmar sejak tahun 1948, perlu melakukan perubahan baru bagi kekuatannya yang semakin buruk di mata masyarakatnya dan juga dunia internasional.

Sebuah kegagalan ekonomi dari kebijakan nasionalisasi yang dijalankan pemerintahan junta militer tahun 1960an juga telah menjadi permasalahan umum di kalangan masyarakat Myanmar. Terdapat pertarungan sengit antara kedua pihak (pemerintahan dan

<sup>235</sup> United Nation, "Human Development index Report 2009", www.undp.org

masyarakat) yang telah memaksa rejim Ne Win untuk menghentikan segala kecenderungan totalitariannya. Junta militer harus mulai mentolerir segala kekuatan-kekuatan non-negara untuk menjamin kelangsungan hidup rejim itu, yang juga nyatanya menyebabkan “pembusukan” lebih lanjut visi sosialis rejim itu sendiri. Atas kemerosotan dari peran junta militer tersebut, Pada akhirnya para anggota senior rejim yang mempunyai komitmen paling kuat pada ideal-ideal sosialis dipensiunkan atau disingkirkan, yang “membuat partai berada di tangan pejabat yang tidak mempunyai keyakinan ideologis konkrit.”<sup>236</sup>

Partai sosialis Burma (*Burma Socialist Programme Party/ BSPP*) yang dikuasai rejim Ne Win, telah menerapkan langkah-langkah otoritarian yang lebih tipikal, di mana partai politik oposisi terus menerus diredam. Meskipun begitu, rejim militer mulai membiarkan dan mentolerir *pluralism* sosial dan ekonomi terbatas. Sebuah kasus yang relevan adalah usaha aktif rejim BSPP untuk memperbaharui ikatan-ikatannya dengan Bangsa Buddha, di mana sebelumnya rejim ini bermusuhan. Pada awal 1980an, rejim BSPP berupaya “mencapai hubungan lebih erat antara negara dan *sangha* dibanding dengan siapa pun sejak kemerdekaan”. Namun seringkali hal ini gagal dilakukan karena sulitnya perdamaian di kedua pihak yang sama-sama keras dalam menentukan sikap mereka.<sup>237</sup>

<sup>236</sup> Kyaw, Yin Hlaing, “*Reconsidering the Failure of the Burma Socialist Program Party Government to Eradicate Internal Economic Impediments*”, South East Asia Research, March 2003, hal 35.

<sup>237</sup> Ne win mulai menerima sebuah tradisi pada pemimpin negara untuk menyelenggarakan organisasi Buddhisme dan juga membayar dengan

Pada tahun 1981, setelah satu dekade pereformasian BSPP ke dalam partai politik berbasis masa, untuk pertama kalinya petani menjadi bagian terbesar dalam keanggotaan BSPP.<sup>238</sup> Pada puncak perluasan keanggotaan BSPP, ada lebih dari dua juta anggota. Rakyat dari berbagai sektor negara itu bergabung dengan BSPP, termasuk tokoh-tokoh politik prakudeta dan rekan-rekan mereka, pegawai negeri sipil karir, oportunistis dan pencari kerja. Walaupun rezim BSPP berusaha menggalang dukungan untuk kekuasaannya yang berkelanjutan, namun lagi-lagi kesalahan kelola perekonomian negara dan ditinggalkannya ideologinya yang hancur, telah menggiring keruntuhan rejim BSPP itu sendiri.<sup>239</sup>

Pada akhir rejim BSPP ini, menjadi jelas bahwa rejim BSPP tetap represif secara politik. Bahkan kegagalan ekonomi telah menggiring situasi di Myanmar pada puncak kekacauan yang muncul akibat frustrasi yang terpendam dengan keresahan dan protes umum oleh demonstrasi mahasiswa pada tahun 1988 yang pada akhirnya menyebabkan pengunduran diri Ne Win dari pemerintahan. Bahkan beberapa kalangan pegawai negeri, termasuk polisi dan beberapa anggota militer berpangkat rendah bergabung dengan pemogokan dan demonstrasi berskala nasional untuk menentang negara

---

hormat para biarawan. Ne win diketahui telah menjadi pelindung utama pembangunan Pagoda Wijaya di Rangon/ Yangon. Terdapat pada (Keown, Damien. *A Dictionary of Buddhism*. Oxford: Oxford University Press, 2003, hal 167).

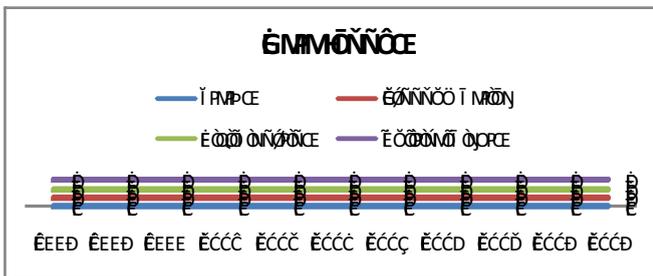
<sup>238</sup> Taylor, Robert, *The State in Myanmar*, Honolulu: The University of Hawaii Press, 2009a, hal 302.

<sup>239</sup> Shwe Lu Maung, *Burma: Nationalism and Ideology*, Dhaka: The University Press Limited, 1989, hal 95.

BSPP. Hal inilah merupakan titik berakhirnya kekuasaan junta militer Ne Win karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, yang pada akhirnya dia harus digantikan oleh Dr. Maung-Maung.<sup>240</sup>

Semenjak pemerintahan Dr. Maung-Maung sampai dengan pemerintahan jenderal Than Shwe tahun 1997, roda pemerintahan politik tetaplah sama yakni bersifat otoriter dan sentralistik. Kemerossotan legitimasi ini pun diperkuat dengan data indeks *Freedom House* yang mengeluarkan sebuah data demokrasi di Myanmar dengan menunjukkan kekuatan rezim militernya yang semakin kuat, dan tidak adanya hak-hak individu dalam berpolitik dan sosial. Dari data *Freedom House* ini penulis merunut waktu sejak masa berakhirnya kepemimpinan rezim SLORC yang beralih menjadi SPDC berkuasa pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 diselenggarakannya konstitusi baru (sebagai langkah nyata menuju demokrasi). Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa dari awal

**Gambar : I Data Indeks Freedom House Untuk Myanmar (1997-2008)**<sup>241</sup>



Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa dari awal pembentukan SPDC yang dijalankan oleh jenderal Than Shwe yang merupakan

peralihan dari SLORC, kekuatan militer tetap menjadi peran utama dalam kehidupan di Myanmar. Penilaian angka 7 merupakan penilaian *not free* yang dikeluarkan oleh Freedom House sejak keberlangsungan rezim SPDC sampai dengan dibentuknya konstitusi 2008, merupakan salah satu indikasi bahwa Myanmar memang negara yang masih belum dapat dikatakan sukses dalam berdemokrasi. Kesalahan kelola pemerintahan junta militer dalam membangun perekonomian, telah membuat situasi di Myanmar semakin buruk.

Salah satu ancaman lainnya bagi pemerintah junta militer adalah menguatnya kelompok oposisi dalam memperjuangkan hak-hak kaum minoritas di Myanmar. Faktor ini merupakan salah satu indikator dari pendekatan transisi yang dikemukakan oleh Potter. Dalam indikator ini menunjukkan bahwa adanya para demonstran atau pihak oposisi ini yang tidak pernah mundur dari berbagai tindakan yang dilakukan rezim militer tersebut, merupakan salah satu bukti menguatnya kalangan pembangkang di Myanmar. Hal ini barangkali menunjukkan bahwa walaupun sebagian kelompok oposisi dihalangi di dalam keadaan-keadaan normal dari organisasi politik melawan rezim militer, jika terjadi suatu pemberontakan, komitmen pemberontak akan semakin tidak takut meskipun harus mengorbankan diri sendiri.<sup>242</sup>

<sup>240</sup> *Ibid*, hal 43.

<sup>241</sup> <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/1999/burma>

<sup>242</sup> Terdapat empat sumber utama 'oposisi demokrasi' di Myanmar, diantaranya; National Lague for Democracy (NLD), masyarakat sipil, mahasiswa, masyarakat Buddha, dan kelompok etnis minoritas lainnya. (keempat kelompok ini merupakan kelompok oposisi yang paling kuat

Salah satu persoalan yang menjadi tuntutan bersama oleh masyarakat Myanmar ini adalah ditegakannya demokrasi yang kekal dan juga memperbaiki sistem perekonomian yang buruk. Seluruh masyarakat Myanmar merasa bahwa mereka tidak memiliki peluang perekonomian yang layak. Terdapat beberapa aspek dalam hal ini, dimana yang utama mereka meyakini bahwa beberapa sumber daya alam yang ada di Myanmar memiliki potensi untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Namun sayangnya meskipun kaya akan sumber daya alam, masyarakat tidak mendapatkan sama sekali pembagian keuntungan dari penghasilan perdagangan selama ini dengan negara lain.

Tentu saja hal tersebut merupakan kekecewaan masyarakat setempat (etnis minoritas) yang sangat terbebani akan kebutuhan fundamental (ekonomi) mereka, terlebih lagi dampak dari pengeksploitasi sumber daya alam, pengusuran paksa yang dilakukan oleh kalangan militer, dan juga pembagian keuntungan upah tenaga kerja yang tidak adil, telah menjadi permasalahan serius bagi masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi bagian dari kekecewaan masyarakat disamping tuntutan-tuntutan lainnya yang mereka perjuangkan, seperti halnya pengakuan kewarganegaraan, pembagian wilayah, diskriminasi sosial, dan juga pengeliminasi dalam berpolitik.

Salah satu kelompok oposisi yang paling besar menyuarakan aspirasinya di antara kelompok-kelompok lainnya, adalah kelompok NLD (*National League for Democracy*)

---

memperjuangkan hak-hak mereka dalam bernegara).

bertukan Aung San Suu Kyi, yang seringkali mendapatkan pertentangan dari pihak pemerintahan militer. NLD yang dibentuk pada tanggal 24 September 1988, setelah dibentuknya formasi *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) merupakan upaya nyata oposisi dalam memperjuangkan demokrasi yang adil di Myanmar. Melalui sebuah *platform* politik yang luas, NLD telah menarik sebagian masyarakat Myanmar dalam menyerukan demokrasi. NLD juga semakin menonjol ketika Aung San Suu Kyi memimpin organisasi tersebut, dikarenakan Aung San Suu Kyi merupakan salah satu putri dari seorang pahlawan nasional di Myanmar. Berbeda dengan aksi protes sebelumnya, kini pada tahun 1989 NLD semakin kuat dalam melawan militer yang semakin brutal menghadapi para demonstran.<sup>243</sup>

Menyadari popularitas NLD yang semakin meningkat, dan juga dapat mengancam stabilitas negara, pada akhirnya SLORC menempatkan Aung San Suu Kyi di bawah penahanan rumah pada bulan Juli 1989. Penahanan rumah yang ditujukan kepada pemimpin NLD tersebut, tidak menjadikan partai NLD menurun dalam hal perolehan suara di pemilu 1990. NLD tetap menjadi salah satu pendukung terbanyak dalam memajukan demokrasi di Myanmar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika NLD cukup berhasil memenangkan pemilu tahun 1990. Atas kemenangan tersebut, pada tanggal 28 Juli 1990 NLD meminta penyerahan kekuasaan dari SLORC kepada pemerintahan yang dipilih

---

<sup>243</sup>

Bertil Lintner, *Burma in Revolt : Opium and Insurgency since 1948*, (Second Edition), Silk Worm Books, Bangkok 1999, p374.

secara demokratis. Namun ketika itu SLORC menolaknya dengan tegas atas tuntutan mereka, dikarenakan militer tidak ingin kekuasaannya digeserkan oleh kelompok manapun yang menginginkan adanya perubahan di dalam negeri. Atas ketidaksepakatan tersebut, pada akhirnya kelompok oposisi dan masyarakat lainnya melakukan aksi protes yang lebih besar terhadap pemerintahan junta militer<sup>244</sup>

NLD dan Aung San Suu Kyi pada khususnya telah memperoleh dukungan moral yang tinggi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dukungan tersebut merupakan sebuah upaya dalam memperjuangkan demokrasi di Myanmar, dimana negara ini cukup lama tidak merasakan keadilan dari pemerintahannya sendiri terhadap segala aspek kehidupan di Myanmar. Kekuatan kelompok oposisi ini tanpa disadari menjadi sebuah ancaman serius bagi pemerintahan militer, dan menghantarkannya untuk dapat mencari cara alternatif dalam membendung aksi demokrasi tersebut. Salah satu upaya rezim adalah mengadakan pembatasan-pembatasan yang ketat pada aktivitas oposisi dan juga mengintimidasi semua orang yang diidentifikasi ada hubungannya dengan pihak oposisi. Dalam hal ini rezim terus menerus mengkhawatirkan keberadaan oposisi ini yang dapat mengancam keutuhan negara, yang pada akhirnya menyebabkan legitimasi pemerintahan militer ini semakin merosot.<sup>245</sup>

### **Tuntutan Negara-negara Donor Terkait Dengan Bantuan Ekonomi di Myanmar**

Indikator lainnya terkait dengan pendekatan struktural yang dikemukakan oleh Potter adalah munculnya *international linkage* yang mempengaruhi proses demokrasi di Myanmar. Salah satunya berkaitan dengan tuntutan beberapa negara donor terhadap perekonomian di Myanmar. Pada tahun 1952, Myanmar mulai masuk anggota Bank Dunia, *International Finance Corporation (IFC)* pada tahun 1956, dan *International Development Association (IDA)* pada tahun 1962. Selama periode 1956-1961, Bank Dunia telah mengucurkan tiga pinjaman yang berjumlah total US\$33,3 juta di sektor transportasi. Namun, selama tahun 1962-1973, tidak ada pemberian pinjaman yang diminta. Pemberian pinjaman dipulihkan kembali pada tahun 1973 dan selama periode 1973-1987 sebanyak 30 kredit IDA yang berjumlah total setara dengan US\$804 juta yang dijanjikan, dan US\$752,8 juta dicairkan. Pemberian pinjaman baru berhenti setelah tahun 1987, akibat kurangnya dialog mengenai kebijakan ekonomi.<sup>246</sup>

Selama periode 1956-1987, 26% pencarian IDA/IBRD adalah untuk mendukung proyek-proyek pertanian, 16% untuk proyek-proyek kehutanan, 24% proyek-proyek sektor *energy*, 17% untuk proyek-proyek transportasi, dan sisanya 16% untuk proyek-proyek pertambangan, manufakturing, dan telekomunikasi. Namun pada akhirnya

<sup>244</sup>

*International Crisis Group (ICG).*(2000). *Burma/Myanmar: How Strong is The Military Regime?*, *ICG Asia Report* No 11, *Bangkok/Brussels*. hal 22.

<sup>245</sup> *Ibid.*,

<sup>246</sup> *International Monetary Fund, Myanmar 2011 Article IV Consultation, IMF Country Report* No.12/104, May 2012, Prepared by World Bank Staff, hal 6.

Myanmar harus menunggak pada Bank Dunia bulan Januari 1998 dan telah dalam status *non-accrual* sejak September 1998. Hutang yang ditunggak dan harus dibayar pada Bank Dunia sekarang berjumlah US\$788,3 juta. Keterlibatan Bank Dunia ini telah dibatasi pada pemantauan perkembangan-perkembangan ekonomi dan sosial di Myanmar berdasarkan informasi dan laporan yang ada, penghubungan dengan donor dan agensi internasional lain, partisipasi berkelanjutan dalam misi Artikel IV IMF, dan dalam beberapa kasus pemberian input analitis pada pekerjaan donor lain di bidang-bidang tertentu.<sup>247</sup>

Selain bergabung dengan Bank Dunia, Myanmar juga bergabung dengan Bank Pembangunan Asia (AsDB) sejak tahun 1973 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Myanmar menjadi salah satu peminjam terbesar Bank Pembangunan Asia (AsDB) pada tahun 1980,<sup>248</sup> meskipun ketika itu Myanmar dikuasai oleh junta militer yang tanpa legitimasi konstitusional, baik dari pemerintah negara-negara Barat dan Timur serta lembaga-lembaga internasional, yang tidak siap untuk menerapkan sanksi-sanksi terhadap junta militer. Malahan mereka menyediakan dukungan ekonomi yang vital bagi pemerintah, khususnya selama dekade pemerintahan berikutnya. AsDB sejauh ini telah memberi 32 pinjaman yang berjumlah \$530,9 juta untuk 28 proyek. Dari pinjaman-pinjaman ini, dua pinjaman yang berjumlah \$6,6 juta adalah dari *Ordinary Capital Resources* (OCR) AsDB, dan 30 pinjaman yang berjumlah \$524,3

juta adalah dari pendanaan sumber daya khususnya. Namun semua pinjaman pada Myanmar tersebut telah ditutup. AsDB sejauh ini telah memberi bantuan teknis (*technical assistance/TA*) yang berjumlah \$10,7 juta untuk 38 proyek. Dari ke-38 proyek TA ini, 28 adalah *preparatory* proyek dan 10 adalah *advisory*.<sup>249</sup>

Pinjaman terakhir proyek-proyek TA untuk Myanmar disetujui pada tahun 1986 dan 1987, secara berturut-turut. Myanmar adalah anggota partisipan dari program kerjasama ekonomi yang dibantu AsDB di *Greater Mekong Subregion* (GMS Program). Dalam kapasitas itu, Myanmar berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan dan workshops regional. Koordinasi erat dipertahankan dengan IMF, Bank Dunia, dan UNDP dengan penekanan khusus diberi pada penilaian program reformasi ekonomi pemerintah dan tindakan-tindakan kebijakan yang direkomendasikan. Hubungan dipertahankan dengan para donor bilateral utama Myanmar mengenai status program bantuan mereka. Sejak tanggal 7 Agustus 2007, total pembayaran cicilan pinjaman jatuh tempo Myanmar berkenaan dengan pinjaman-pinjaman *Asian Development Fund* (ADF) AsDB setara dengan \$ 234,7 juta. Kemudian pada 18 Desember 2003, Myanmar membayar kembali OCR-nya yang dihutang pada AsDB yang berjumlah EUR 1.225,200 dan melunasi tunggakannya berdasarkan pinjaman-pinjaman OCR. Hingga sekarang, Myanmar tidak memberi indikasi mengenai maksudnya untuk melunasi pembayaran cicilan pinjaman jatuh

---

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> *Asia Development Bank Worries About Aid Cuts*, Sarasota Herald-Tribune (April 30 1981)

---

<sup>249</sup> International Monetary Fund, *Myanmar 2011 Article IV Consultation, Op.Cit*, hal 7.

tempo berdasarkan pinjaman-pinjaman ADF.<sup>250</sup>

Hubungan bilateral Myanmar tidak hanya dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, namun juga dengan negara-negara donor lainnya seperti China, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) yang lebih dimantapkan setelah kemerdekaan tahun 1948. Sejak berhubungan dengan AS, Myanmar relatif stabil

**Tabel : 2 Pemberian Pinjaman AsDB Kepada Myanmar**<sup>251</sup>

Sector	Loans (number)	Loans (\$million)	%
Agriculture and Natural Resource	14	296.1	55.8
Health, Nutrition and Social Protection	2	63.1	11.9
Industry and Trade	5	46.4	8.7
Transport and Communication	2	42.5	8.0
Water Supply, Sanitation and Waste Management	4	36.0	6.8
Energy	4	26.8	5.0
Multisector	1	20.0	3.8
Total	32	530.9	100.0

sampai dengan meletusnya aksi demonstrasi tahun 1988. Myanmar adalah salah satu pewaris awal program *Generalized System of Preference*

<sup>250</sup> *Ibid.*

<sup>251</sup> [http://www.adb.org/Documents/Fact\\_Sheets/MY\\_A.asp](http://www.adb.org/Documents/Fact_Sheets/MY_A.asp)

(GSP)<sup>252</sup> AS pada tahun 1976, yang diberi status “*Most Favoured Nation*” dan didukung AS dalam penetapan bantuan pembangunannya oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Selanjutnya pada September 1980 AS juga membentuk kembali kerjasama ekonomi langsung, dan menandatangani paket bantuan baru, meskipun dengan proporsi 'sedang'.<sup>253</sup> Bantuan-bantuan ekonomi tersebut diberikan sebelum pemberontakan 1988 ketika AS menyumbangkan \$5 juta untuk program anti narkotika dan \$260.000 untuk pelatihan militer Myanmar.<sup>254</sup> Hal ini terlihat jelas bahwa sejak periode kemerdekaan dan pemberontakan yang mengakhiri kekuasaan BSPP, AS telah bertindak sebagai kunci utama dukungan keuangan untuk Myanmar.

Demikian juga dengan China, Jepang, Jerman Barat dan seluruh negara-negara lain yang ikut memberikan bantuan keuangan kepada rezim BSPP. China memberikan dukungannya terhadap Myanmar tahun 1962, dan menjadi donatur terbesar kedua bagi Myanmar (setelah AS) tahun 1965.<sup>255</sup> Meskipun

<sup>252</sup> System AS Generalized of Preferences (GSP) adalah program Amerika yang dirancang untuk meningkatkan ekonomi di negara-negara berkembang dengan menyediakan preferensial bebas bea masuk hingga 5.000 produk, ketika diimpor dari salah satu 127 negara dan wilayah penerima yang ditunjuk. Produk yang dimaksud diantaranya; berbagai jenis bahan kimia, mineral dan batu bangunan, perhiasan, jenis karpet, dan produk-produk pertanian dan perikanan tertentu. Terdapat pada, <http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp>, diakses pada tanggal 1 Maret 2013.

<sup>253</sup> Denis D. Gray, Burma, Asia's hermit, stays on a neutral course, *The Lewiston Journal* (February 15

<sup>254</sup> *House Exhorts Burma on Democracy, The Washington Post* (September 8 1988). Robert Karr McKabe, Ne Win's secret Burma;

bantuan sementara ditunda pada tahun 1967, hubungan tegang selanjutnya dengan junta militer berakhir kembali pada tahun 1971 ketika hubungan antara keduanya mengalami perbaikan yang menonjol.<sup>256</sup> Buktinya, pada tanggal 12 Juli 1979 pemerintah China menandatangani program bantuan Myanmar di Beijing yang terdiri dari delapan proyek. Hal ini meliputi pembangunan jembatan Rangoon-Syria, 40.000 *spindle* (jarum) mesin produksi-benang, tiga penggilingan beras, pasokan air untuk kota Moulein, dan sumbangan 3 juta Renminbi-Yuan untuk perkakas dan beberapa mesin.<sup>257</sup>

Jepang juga telah menjadi salah satu kontributor keuangan paling konsisten bagi Myanmar sejak tahun 1950-an. Ketika China menarik sementara bantuannya tahun 1967, respon Jepang adalah menambah sumbangan bantuannya dalam rangka membantu penyelesaian proyek-proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Peking.<sup>258</sup> Pada tahun 1971 Jepang juga menyepakati untuk menyediakan bantuan \$71 juta lagi dalam paket bantuan ekonomi baru. Pada tahun 1976 Jepang dikategorikan sebagai penyumbang tunggal terbesar untuk bantuan *Official Development Assistance* (ODA) yang diberikan melalui *Burma Aid Group*. Dari tahun 1988, bantuan ini sudah berjumlah sekitar \$1,42 milyar, dimana

bantuan ini masuk melalui bentuk pinjaman proyek, pinjaman komoditi, bantuan hibah, bantuan teknis dan bantuan pangan.<sup>259</sup>

Diantara tahun 1980 dan 1988, Myanmar tetap konsisten berada diantara sepuluh penerima bantuan Tokyo dengan pembayaran bantuan satu tahun yang mencapai \$244,1 juta pada tahun 1986 dan \$259 juga tahun 1988 (tidak termasuk pembayaran yang dilakukan kepada lembaga-lembaga seperti ADB).<sup>260</sup> Bantuan Jepang terhadap Myanmar selama 26 tahun ini menunjukkan bahwa Myanmar memiliki sekutu-sekutu yang kuat. Bahkan, negara-negara seperti Jerman Barat, Uni Soviet dan Selandia Baru ikut serta dalam menyalurkan bantuan ekonomi terhadap Myanmar.<sup>261</sup> Pada tahun 1970-an Selandia Baru menyediakan antara \$150.000 dan \$200.000 bantuan kepada Myanmar setiap tahunnya. Sebagian besar bantuan ini disalurkan melalui *Colombo Plan*<sup>262</sup> dan sebagian besar mendukung sekolah-sekolah pelatihan perdagangan, dimana

---

“When China Spits we Swim”, *Burmese are waiting for 'a leak in the boat'* (February 27 1966).

<sup>256</sup> Ibid.,

<sup>257</sup> *Chronology of Chinese Burmese Relations, The Irrawady* (January 1 2003).

<sup>258</sup> *Burma Independence Advocates. Burma Sanctions Regime: The Half-Full Glass and a Humanitarian Myth, London, 8 August 2011*, hal.8

---

<sup>259</sup> Ibid

<sup>260</sup> Donald M. Seekins *Japan's "Burma Lovers" and The Military Regime, Japan Policy Research Institute, Working Paper No.60* (September 1999).

<sup>261</sup> *Burma Independence Advocates. Burma Sanctions Regime*, Loc.Cit

<sup>262</sup> Colombo Plan telah dibangun pada Konferensi Persemakmuran di Luar Negeri yang diselenggarakan di Colombo, Ceylon (sekarang Sri Lanka) pada bulan Januari 1950 dan diluncurkan pada tanggal 1 Juli 1951. Awalnya itu disebut sebagai *Colombo Plan for Cooperative Economic Development in South and Southeast Asia*. Hal ini telah berkembang sejak hadirnya 7 kelompok negara persemakmuran, seperti Australia, Inggris, Kanada, Ceylon, India, Selandia Baru, dan Pakistan, termasuk bukan negara persemakmuran. Terdapat pada <http://www.crwflags.com/fotw/flags/int-cmbo.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2013.

dukungan ini pula diperkuat oleh sejumlah lembaga-lembaga multinasional.<sup>263</sup>

Namun, hal ini bukannya menyatakan bahwa hubungan antara rezim dan masyarakat internasional berjalan mulus selama periode pemerintahannya. Buktinya, China memotong bantuannya ke Myanmar pada tahun 1967, dan walaupun ini hanya merupakan kebijakan sementara, penerapannya pasti sangat berarti karena ini menegaskan bahwa setiap kekecewaan yang dilakukan junta militer terhadap para pemberontak, tidak akan ditolerir. Meskipun bantuan dipulihkan tahun 1970, pemerintah China terus mendukung pemberontakan anti-pemerintah, yang jelas mengisyaratkan bahwa hubungan bersahabat kedua negara masih jauh dari istilah “baik”. Demikian juga, pemberian bantuan ekonomi AS tidak menegaskan bahwa hubungan “kuat”, karena sebetulnya AS bereaksi terhadap kudeta 1962 dengan mengakhiri kerjasama ekonomi langsung.

Reaksi AS juga dibuktikan pada bulan Februari 1965, dimana saat itu Kongres AS mencurigai kedekatan Myanmar dengan China dan maksudnya menggulingkan pemerintah Thai, AS mulai melakukan investigasi pemberian bantuannya terhadap Myanmar.<sup>264</sup> Di samping itu juga AS menghentikan program bantuan tahunan sebesar \$27 juta pada Juni

1971, yang menegaskan titik balik penting dalam hubungannya dengan rezim militer. Begitu pun dengan lembaga-lembaga keuangan internasional yang menunjukkan kekecewaan serupa terhadap rezim militer dengan larangan pemberian pinjaman kepada Myanmar. Bank Dunia juga menyetujui tidak ada pemberian pinjaman baru ke Myanmar dari tahun 1987 ketika rezim militer masih jelas berkuasa. Demikian pula, ketika Myanmar dilibatkan dalam Program Kerjasama Ekonomi Bank Pembangunan Asia, ADB menghentikan pemberian pinjaman dan hibah negara ini tahun 1986.<sup>265</sup> Hal tersebut menandakan bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut telah menunjukkan kekecewaannya terhadap pemerintahan junta militer, yang terus menerus melakukan pelanggaran demokrasi dan HAM di dalam negeri.

Beberapa lembaga internasional ini telah menganalisis kondisi perekonomian Myanmar selama bertahun-tahun dan telah disadari bahwa beberapa masalah (krisis ekonomi) yang terjadi di Myanmar harus segera diselesaikan. Bahkan lembaga tersebut juga dicegah dari keikutsertaan di dalam program-program Myanmar, karena negara-negara donor seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat tidak mengizinkannya (terkait dengan pelanggaran prinsip Hak Asasi Manusia dan Demokrasi). Hal inilah yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi Myanmar, ketika negara-negara donor melakukan kecaman yang serius terhadap negara yang puluhan tahun dipimpin junta militer tersebut. Namun meskipun begitu

---

<sup>263</sup> Guy Wilson-Roberts “*Beyond the Rhetoric: New Zealand and Myanmar*” in Anthony L. Smith (Ed.), *Southeast Asia and New Zealand; a History of regional and bilateral relations* (Institute of Southeast Asia Studies 2005) p.269.

<sup>264</sup> Robert S. Allen and Paul Scott, *House to Probe Aid to Burma*, Sarasota Herald-Tribune (February 21, 1965)

---

<sup>265</sup> *Burma Independence Advocates. Burma Sanctions Regime..Op.Cit*, hal 7

sepertinya junta militer menolak secara konsisten untuk melakukan setiap langkah perbaikan yang diusulkan oleh ketiga lembaga, seperti menyarankan junta militer untuk dapat membuka ekonomi mereka untuk investasi, privatisasi di sektor energi, dan pemotongan subsidi.<sup>267</sup>

Atas tindakan junta militer tersebut, IMF dan Bank Dunia sejak saat itu menutup semua pinjaman untuk junta militer, karena mereka telah gagal dalam memenuhi standar kebijakan IMF untuk investasi. Setiap bantuan ekonomi yang tidak serius difokuskan pada perbaikan-perbaikan oleh pemerintahan Myanmar ini, sebagian besar akan menjadi investasi yang disia-siakan. Namun lain halnya apabila perbaikan-perbaikan makro ekonomi menjadi mungkin terjadi di Myanmar, maka kebijakan moneter harus dapat dimulai dari *Central Bank of Myanmar* dan dua bank yang dikuasai militer yang mengatur tentang transaksi-transaksi mata uang untuk junta militer (SPDC). Nilai tukar yang disatukan harus dapat ditetapkan, nilai-nilai bunga untuk pinjaman dan uang tabungan harus ditetapkan ke kondisi pasar yang nyata, dan juga kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pada praktek-praktek moneter internasional yang diterima harus dapat diperkenalkan.<sup>267</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, keseluruhan upaya demokratisasi yang

dilakukan oleh junta militer di Myanmar, tidak lain karena adanya pengaruh dari internal dan juga pengaruh eksternal yang begitu besar. Pengaruh internal dimulai dengan munculnya krisis ekonomi di Myanmar yang telah menyebabkan masyarakat hidup dalam keterbelakangan sosial (kemiskinan). Pada dimensi ini, telah terjadi kegagalan pemerintah dalam mengatasi persoalan kebutuhan mendasar bagi rakyatnya, antara lain kegagalan dalam mempertahankan tingkat kemakmuran rakyat, yang pada akhirnya Myanmar masuk kedalam kategori negara terendah se-Asia Tenggara, dan kategori negara miskin tahun 1997 berdasarkan laporan UNDP. Tuntutan-tuntutan terkait krisis ekonomi ini tidak hanya muncul dari kelompok masyarakat pro demokrasi, namun juga dari lembaga keuangan internasional dan negara-negara lain yang melakukan hubungan perdagangan dengan Myanmar.

Indikator selanjutnya yang menambah beban masalah Myanmar adalah semakin menguatnya *civil society*, partai oposisi, sampai dengan kelompok separatis yang menjadi beban panjang pemerintahan Myanmar. Kelompok masyarakat ini berjuang keras untuk demokrasi dan kenaikan harga, juga menginginkan adanya perubahan yang berarti di dalam negeri seperti halnya perubahan kekuasaan dari junta militer ke pemerintahan sipil yang lebih demokratis. Myanmar terlalu lama dikendalikan oleh pemerintahan junta militer yang otoriter dan sentralistik, serta cara-cara kekerasan yang dilakukan pemerintahan menyebabkan semakin menguatnya kelompok oposisi dalam melakukan aksi pemberontakan, salah satunya adalah partai NLD bentukan Aung San Suu Kyi,

<sup>266</sup> Priscilla Clapp, *Building Democracy in Burma*, *United States Institute of Peace Working Paper*, 24 July 2007, hal 51

<sup>267</sup> *Ibid.*,

tokoh moral demokrasi di Myanmar, yang paling keras menyuarakan demokrasi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Beban masalah pun semakin bertambah ketika negara-negara donor dan juga lembaga keuangan internasional melakukan penutupan pinjaman keuangan terhadap Myanmar. Setiap aksi yang dilakukan junta militer terkait dengan pelanggaran demokrasi dan hak azasi manusia, telah memunculkan respon dunia internasional untuk bergerak lebih cepat menekan kekerasan yang dilakukan junta militer. Indikator kemiskinan juga telah membuat hubungan dengan negara-negara lain pun menjadi terhambat, dan memunculkan respon dari dunia internasional untuk melakukan tindakan yang lebih keras terhadap pemerintahan Myanmar, salah satunya dengan pemberhentian pinjaman keuangan dalam berbagai sektor yang telah disepakati sebelumnya.

Keseluruhan indikator demokratisasi tersebut pada akhirnya mendorong merosotnya legitimasi junta militer di kancah perpolitikan. Kepercayaan masyarakat dan juga dunia internasional semakin tidak ada, karena kegagalan junta militer dalam mengelola seluruh perekonomian di dalam negeri. Sejak kepemimpinan U Nu sampai dengan Ne Win, kebijakan yang diambil terkait perekonomian mengalami kegagalan, dimana terbukti pemberontakan dari kalangan masyarakat sosial, kelompok oposisi, sampai dengan kelompok separatis semakin besar yang menunjukkan ketidakberpihakan masyarakat terhadap pemerintahan. Begitu juga dengan kepemimpinan Than Shwe, gaya kepemimpinan yang ditunjukkan tetaplah sama, yaitu bersifat otoriter dan sentralistik, juga sistem liberalis

yang diterapkan tidak memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi di dalam negeri. Karakteristik pemerintahan yang seperti inilah yang memunculkan kebencian dari seluruh masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan krisis junta militer dan pada akhirnya muncul kekhawatiran tersendiri dari diri junta militer untuk melakukan demokratisasi.

## Referensi

### Buku dan Jurnal

- Alan Collins. (2003). *Security and Southeast Asia : Domestic, Regional and Global Issues*. Singapore: ISEAS.
- Anders Uhlin. (1998). *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Anthony L. Smith (Ed.). (2005). *Southeast Asia and New Zealand; a History of regional and bilateral relations*. Institute of Southeast Asia Studies.
- Bertil Lintner. (1999). *Burma in Revolt : Opium and Insurgency since 1948*. (Second Edition). Silkworm Books. Bangkok
- Burma Independence Advocates.(2011). *Burma Sanctions Regime: The Half-Full Glass and a Humanitarian Myth*. London.
- Consultative Group. (2007-2013).*"The EC-Burma/Myanmar Strategy Paper*
- David Potter (Ed.). (2000). *Democratization*. Cambridge: Open University Press.
- David I. Steinberg.(2010). *"Burma/Myanmar: What Everyone Needs To Know"*. Oxford University Press
- Denis D. Gray. (1984). *Burma, Asia's hermit,*

- stays on a neutral course*. The Lewiston Journal
- Donald M. Seekins Japan's (1999). "Burma Lovers" and The Military Regime. Japan Policy Research Institute, Working Paper No.60
- Ganganath Jha. (2011). *The Quest for Democratization in Myanmar*. The Observer London
- Guillermo O'Donnell, et.al. (eds.). (1986) *Transition from Authoritarianism Rule: Prospect for Democracy*. Vol. 3. The John Hopkins University Press
- International Crisis Group (ICG). (2000). *Burma/Myanmar: How Strong is The Military Regime?*, ICG Asia Report No 11, Bangkok/Brussels.
- International Monetary Fund. (2012). *Myanmar 2011 Article IV Consultation*, IMF Country Report No.12/104. Prepared by World Bank Staff.
- Kyaw, Yin Hlaing. (2003). "Reconsidering the Failure of the Burma Socialist Program Party Government to Eradicate Internal Economic Impediments". South East Asia Research
- Keown, Damien. (2003). *A Dictionary of Buddhism*. Oxford: Oxford University Press
- Mohtar Mas'oed. (2003). *Negara, Kapital, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad AS Hikam. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES. Jakarta
- Priscilla Clapp. (2007). *Building Democracy in Burma*. United States Institute of Peace Working Paper.
- Robert Karr McKabe. (1966). *Ne Win's secret Burma; "When China Spits we Swim", Burmese are waiting for 'a leak in the boat"*. New American Library New York.
- Samuel P. Huntington (Terj.). (1995). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Shwe Lu Maung. (1989). *Burma: Nationalism and Ideology*. Dhaka: The University Press Limited
- Taylor, Robert. (2009). *The State in Myanmar*, Honolulu: The University of Hawaii Press
- Artikel Online**
- Burma Country Profile. Diakses dari [http://news.bbc.co.uk/2/hi/Europe/country\\_profiles/1300003.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/Europe/country_profiles/1300003.stm).
- Colombo Plan . Terdapat pada <http://www.crwflags.com/fotw/flags/int-cmbo.html>
- Lina Gong. *Regional Implications of National Reconciliation in Myanmar*. NTS Alert March 2012 diakses dari <http://www.rsis.edu.sg/nts/HTML-Newsletter/alert/NTS-alert-mar-1201.html>
- Office of the United States Trade Representative diakses pada <http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp>
- Sarasota Herald-Tribune (April 30 1981) *Asia Development Bank Worries About Aid Cuts*
- The Washington Post (September 8 1988). *House Exhorts Burma on Democracy*

**156** Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar

The Irrawady (January 1 2003). *Chronology of Chinese Burmese Relations*